



RENJA 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja/ Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja/ Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Praya, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Tengah

BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

NIP. 19640804 198609 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	80
BAB III Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB	81
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	81
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	81
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	86
BAB V Penutup	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten LombokTengah.....	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah	36
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah.....	40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas P3AP2KB Tahun 2024.....	83
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan Renja 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan
- Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2024 :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 99).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2024, adapun tujuannya adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Lombok Tengah dengan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024;
3. Menyiapkan bahan dan pedoman untuk penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik dengan pola Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3AP2KB Tahun 2022
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan dan Sasaran DP3AP2KB
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Evaluasi ini berguna untuk melihat capaian kinerja yang telah di capai sehingga dapat di buat program rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun yang akan datang dengan lebih tepat sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya agar dapat di antisipasi pada pelaksanaannya pada tahun berikutnya, serta memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang dapat membantu terlaksananya kegiatan tersebut dengan optimal.

Berikut tabel 2.1 mengenai rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja

DP3AP2KB Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra DP3AP2KB Kab. Lombok tengah :

Table 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023

Nama OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Kegiatan (Out Put) Sub Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2023)		
			S	K	Rp		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		K	S	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)$	

2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				691.105.983							583.029.134	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100%	164.829.932	100%	100%	100%	100%	100%	100%	164.829.932	100%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100%	37.356.232	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37.356.232	100%
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2	28.974.792	110 orang	50 ORANG /92 ORANG	50 ORANG/ 92 ORANG	100%	2 DOKUMEN	2	28.974.792	100%

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PERANGKAT DAERAH	26	8.381.440	0	-	-	-	26 OPD	26	8.381.440	100%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	100%	127.473.700	70%	100%	89%	89%	100%	100%	127.473.700	100%
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	LAYANAN	50	127.473.700	35 LAYANAN	35 KASUS	31 KASUS	88,57 %	50 LAYANAN	50	127.473.700	100%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	27.748.000	100%

	Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
	eningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	-	-	-	-	-	-	12 ORANG	12 ORANG	27.748.000	100%
		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	ORANG	-	-	-	-	-	-	24 ORANG	24 ORANG	27.748.000	100%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100%	315.547.920	100%	100%	100%	100%	100%	100%	303.350.760	100%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi tentang pencegahan kekerasan	%	100%	26.780.720	100%	100%	100%	100%	100%	100%	26.780.720	100%

	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dan perlindungan terhadap anak											
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2	26.780.720	110 ORANG	110/70 ORANG	110/70 ORANG	100%	2 DOKUMEN	2	26.780.720	100%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan anak yang dilayani	%	100%	288.767.200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	276.570.040	100%
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan	Orang	120	28.460.040	0	120 ORANG	120 ORANG	100%	120 ORANG	120	28.460.040	100%

	perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota											
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	LAYANAN	100	248.110.000	100	29 KASUS	54 KASUS	186%	50 LAYANAN	100	248.110.000	120%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DOKUMEN	1	12.197.160	0	-	-	-	-	-	-	-
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	%	100%	14.340.880	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.800.000	100%

2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Efektifitas PUG melalui implementasi Perbub PUG	%	-	-	-	61,54%	61,54%	100%	100%	100%	2.800.000	0%
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100%	1 DOKUMEN	1	2.800.000	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	PERANGKAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan lembaga P2TP2A yang aktif	%	100%	14.340.880	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	orang	60	14.340.880	12 LEMBAGA	-	-	-	-	-	-	-
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pelaku IR yang dibina	%	100%	57.210.512	46,20%	56,71%	71.43 %	125%	67%	100 %	49.999.802	125%
		Cakupan pelaku IR yang mandiri	%	56,70%		37,03%	-	-	-	-	56,70%		100%

2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase industri rumahan (IR) yang aktif	%	63%	57.210.512	100%	56,71%	71.43 %	100%	54%	54%	49.999.802	100%
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	LAPORAN	2	49.999.802	45 ORANG	30 ORANG	30 ORANG	100%	2 LAPORAN	2	49.999.802	100%
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	DOKUMEN	2	7.210.710	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender dan Anak	DOKUMEN	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-

	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data Gender dan Anak	DOKUMEN	2	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	DOKUMEN	1	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	Predikat	KLA	109.176.739	BELUM MENDAPAT PREDIKAT	PREDIKAT NINDYA	BELUM MENDAPAT PREDIKAT	100%	UTAMA	KLA	62.048.640	KLA
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	100%	62.048.640	100%	PREDIKAT NINDYA	BELUM MENDAPAT PREDIKAT	100%	80%	100%	62.048.640	100%

2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	ORGANISASI	26	62.048.640	-	1 LEMBA GA	1 LEMBAG A	100%	26 OPD	26	62.048.640	26
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	ORANG	45	47.128.099	45 ORANG	-	-	-	-	-	-	-
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2 DOKU MEN	47.128.099	45 ORANG	-	-	-	-	-	-	-

2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.65%	105.916.560	2,80%	2,75%	2.46%	89,45 %	2,70%	2,70 %	72.641.560	100%
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Profil Kependudukan	dokumen	1	33.275.000	-	2,75%	2.46%	89,45 %	-	-	-	-
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	1	33.275.000	-	1 DOKUMEN	-	-	-	-	-	-
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	dokumen	1	72.641.560	100%	2,75%	2.46%	111,00 %	1 DOKUMEN	1	72.641.560	100%

2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	dokumen	1	72.641.560	1	1 Dokumen	1 Doumen	100%	1 DOKUMEN	1	72.641.560	100%
2.14.02.2.02.13	Pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Dokumen Laporan SIGA	dokumen	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokume n	100%	12 DOKUMEN	12	72.000.000	100%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	LAPORAN	-	-	-	-	-	-	139 LAPORAN	139	135.000.000	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	LAPORAN	-	-	-	-	-	-	12 LAPORAN	12	64.200.000	100%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS akseptor KB	%	62,50%	6.438.503.414	119%	60.5%	58.77%	97%	61,50%	61,50%	6.842.004.951	100,00%

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang terpapar program KKBPK	orang	224185	1.425.031.235		60.5%	58.77%	97%	218718	224185	1.497.027.204	100%
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	ORGANISASI	8	48.865.000		25 orang	11 orang	44%	8 organisasi	8	48.865.000	100%
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	UNIT	12	177.786.031	100%	100 orang	100 orang	100%	-	-	0	-

2.14.03.2. 01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	dokumen	8	36.704.700	100%	3 Media	3 Media	100%	8 DOKUMEN	8	36.704.700	100
2.14.03.2. 01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	LAPORAN	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	36 LAPORAN	36	156.000.000	100%

2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	LAPORAN	26	1.161.675.504	100%	12 Balai	12 Balai	100%	24 LAPORAN	26	1.161.675.504	100%
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	LAPORAN	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 LAPORAN	8	93.782.000	100%
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PLKB, PPKB dan SUB PPKBD yang dibina	%	94,39%	718.217.936	100%	60,50%	60,50%	100%	92,39%	94,39%	780.217.936	94,39%
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	LAPORAN	4	27.295.000	100%	42 orang	42 Orang	100%	4 LAPORAN	4	27.295.000	100%

		Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)											
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	ORANG	2054	690.922.936	100%	2004 orang	2004 orang	100%	2040	2054	690.922.936	100%
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	ORGANISASI	-	-	-	-	-	-	10 ORGANISASI	10	62.000.000	100%

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,74%	3.495.759.811	100,00%	60,50%	18.56%	30,70%	14,99%	14,99%	3.495.759.811	100,00%
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	FASKES	173	586.884.023	173 FASKES	63 Faskes	63 Faskes	100%	173 LAPORAN	173	586.884.023	100%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ORANG	2270	641.918.000	2270 ORANG	4930 Orang	1.344 Orang	27,26%	2270 ORANG	2270	641.918.000	100%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	UNIT	50	2.047.957.788	44	13 unit	13 unit	100%	50 UNIT	50	2.047.957.788	100%

2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	LAPORAN	12	154.000.000	462 ORANG	32 Faskes	32 Faskes	100%	12 LAPORAN	12	154.000.000	100%
2.14.03.2.03.11	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional	LAPORAN	15	65.000.000	500 ORANG	550 orang	450 orang	82%	15 LAPORAN	15	65.000.000	100
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Peresentase Kampung KB yang aktif	%	100%	799.494.432	100%	60,5 %	60,5 %	100%	100%	100 %	1.069.000.000	100%

2.14.03.2. 04.03	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	KAMPUNG KB	12	799.494.432	12 KAMPUNG KB	29 Kampung KB	29 Kampung KB	100%	12 KAMPUNG KB	12	325.000.000	100%
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	dokumen	-	-	-	-	-	-	1 DOKUMEN	1	744.000.000	100%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	%	66,65%	1.293.950.000	77,93%	64.65 %	66.96 %	103,00%	65,65%	66,65%	1.118.950.000	103,00%
2.14.04.2. 01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	66,65%	1.293.950.000	77,93%	64.65 %	66.96 %	103,00%	65,65%	65,65%	1.118.950.000	100,00%

	dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi tentang PUP	%	32%								-		-
2.14.04.2.01.01	Pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	KELOMPOK	10	65.000.000	-	4 Kelompok	2 Kelompok	50%	-	-	-	-	-
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	UNIT	25	384.750.000	16 UNIT	24 Unit	24 unit	100%	25 unit	25	384.750.000	100%	

	Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	LAPORAN	4	133.100.000	72 ORANG	70 Orang	70 orang	100%	4 LAPORAN	4	133.100.000	100%
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	KELOMPOK	98	601.100.000	16 KELOMPOK				98 KELOMPOK	98	601.100.000	100%

		Jumlah Catin /PUS yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting				-	7.796 PUS	218 PUS	28%				
		Jumlah IBU Hamil yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting				-	20.080 Orang	16.064 Orang	80%				
		Jumlah Ibu pasca salin yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting				-	20.080 Orang	3.042 Orang	15%				
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	LAPORAN	154	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		B	8.805.027.702	B	B	B	100%	B	B	8.755.027.702	100
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100%	30.499.836	100%	100%	100%	100%	1	100%	30.499.836	100%
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	11.904.697	-	1	1	100%	1 dokumen	1	11.904.697	100%
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	2	18.595.139	3 DOKUMEN	2	2	100%	2 LAPORAN	2	18.595.139	100%

2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	%	100%	8.136.691.986	13 DOKUMEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.136.691.986	100%
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG/BULAN	40 /12	8.094.965.747	12 BULAN	12	12	100%	40 /12 ORANG/BULAN	40 /12	8.094.965.747	100%	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	LAPORAN	18	41.726.239	1 DOKUMEN	1	1	100%	18 LAPORAN	18	41.726.239	100%	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah	%	100 %	103.138.000	3 KEGIATAN	100%	100%	100%	100 % %	100 %	103.138.000	100%	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	5	37.500.000	1 UNIT	-	-	-	5 PAKET	4	37.500.000	100%	

2.08.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	PAKET	12	21.000.000	2 KALI	12 BULAN	12 BULAN	100%	12 PAKET	12	21.000.000	100%
2.08.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	6	44.638.000	1 DOKUMEN	2 LAPORAN	2 LAPORAN	100%	6 LAPORAN	6	44.638.000	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase validasi data aset DP3AP2KB	%	100	50.000.000	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	UNIT	0	-	-	-	-	100%	0 UNIT	0	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	UNIT	0	-	-	-	-	100%	0 UNIT	0	-	-

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UNIT	1	50.000.000	-	-	-	100%	0 UNIT	0	-	-
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Efektifitas layanan organisasi perangkat daerah	%	100%	128.424.000				100%	100% %	100 %	128.424.000	100%
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	12	46.824.000	12 BULAN			100%	12 LAPORAN	12	46.824.000	100%
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LAPORAN	12	81.600.000	12 BULAN			100%	12 LAPORAN	12	81.600.000	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik		80%	356.273.880	12 BULAN			100%	80%	80%	356.273.880	100%

2.08.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UNIT	127	342.730.955	127 UNIT				100%	127 UNIT	127	342.730.955	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	1	13.542.925	-				100%	1 UNIT	1	13.542.925	100%

Dari table 2.1 di atas dapat kami paparkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2022. Pada Tahun 2022 terdapat beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Adanya anggaran yang tersisa pada pembayaran internet balai penyuluh KB Kecamatan yang sudah terbayarkan 12 bulan.
2. Adanya sisa anggaran pada belanja tagihan listrik karena sebagian besar pulsa listrik balai penyuluh KB sudah mendcapai overload pada pengajuan realisasi bulan sebelumnya.
3. Kurangnya peminat akseptor pelayanan KB yang menggunakan kontrasepsi MOW, MOW, dan IUD.
4. Sisa Anggaran pengadaan sepeda motor melalui proses e-catalog.
5. Kesulitan menemukan sasaran calon pengantin, karena budaya kearifan lokal, implementasi aplikasi elsimil belum semua TPK dan catin memahami pelaksanaan orientasi TPK pada bulan Juni 2022.
6. Sebagian besar Tim Pendamping Keluarga belum sepenuhnya memahami tentang proses dan administrasi pendampingan, kurangnya akses data sasaran oleh TPK dan pelaksanaan orientasi TPK di Bulan Juni 2022
7. Pelaksanaan orientasi TPK pada bulan Juni 2022 sehingga pengisian pulsa / paket data internet TPK dilaksanakan mulai pada Juni 2022 sehingga bulan sebelumnya tidak dapat terbayarkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah Untuk Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah

N O	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	-		100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan	-		80	80	80	85	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	-		7.70	46.15	53.85	61.54	61,54%	69,23%	76,92%	84,61%	
4	Persentase Cakupan Unmet Need	-		15.24	14.99	14.7	14.24	18,55	17,4	16,25	15,1	
5	Persentase KB Aktif MKJP	-		27.5	28	28.52	29.1	17,37	19,52	21,67	23,82	

6	Jumlah peserta KB aktif	-		141,214	146,842	152,73	158,839	111.321	118.566	128.811	133.056	
7	Cakupan Layanan Kespro	-		15.7	35	39.6	59.87	59,89	59.90	60	61	
8	Rata-rata usia kawin pertama	-		19.8	19.8	19.9	20	19.9	20	20,9	21	
9	Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur	-		59.25	62.5	64.27	66.17	55,69	57,86	60,03	62,2	
10	Persentase Kelompok ketahanan keluarga yang aktif	-		40	50	55	60	66,96	67,65	68,65	70	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3AP2KB

Beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan program-program kegiatan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait ***Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***

- Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD di Kabupaten Lombok Tengah.
- Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik.
- Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender.
- Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender.
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan utamanya data terpilah lintas sektor.
- Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
- Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak.
- Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan.
- Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko.
- Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Permasalahan terkait ***Pengendalian Penduduk***

- Angka TFR masih cukup tinggi berdasarkan disparitas pendidikan.
- Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk.

- Pemahaman masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan masih rendah.
 - Pemahaman masyarakat tentang Isu-isu Kependudukan masih rendah.
 - GDPK sebagai acuan Pembangunan Kependudukan belum rampung.
- c. Permasalahan terkait ***Keluarga Berencana***
- Tingginya angka Unmet Need.
 - Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria.
 - Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN.
 - belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan.
- d. Permasalahan terkait ***Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang 8 fungsi keluarga.
 - Kurangnya sosialisasi 8 fungsi keluarga kepada masyarakat dan kelompok kegiatan ketahanan keluarga di masing-masing desa.
 - Semua kelompok kegiatan belum mendapatkan pembinaan secara efektif.
 - Kelompok Ketahanan Keluarga UPPKS dan BKR tidak dapat melaksanakan kegiatan secara optimal.
 - Belum optimalnya pengasuhan 1000 HPK sehingga masih ada baduta stunting.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program kegiatan dan sub kegiatan yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan pengndalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan amsyarakt, sehingga menghasilkan program-

program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD pada DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capai an	Pagu Indika tif (Rp.00 0)	Program/Kegiatan /Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capai an	Kebutuha n Dana (Rp.000)	Catat an Penti ng
- 1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	164.829.932	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	164.829.932	

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	37.356.232	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	37.356.232	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	28.974.792	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	28.974.792	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	26	8.381.440	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	26	8.381.440	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	127.473.700	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	127.473.700	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	50	127.473.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	50	127.473.700	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	-	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	-	-	

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
		<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	-	-		<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat	-	-	

			Peningkatan Kapasitas					Peningkatan Kapasitas			
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	315.547.920	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%	315.547.920	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi tentang pencegahan kekerasan dan	100%	26.780.720	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi tentang pencegahan kekerasan dan	100%	26.780.720	

			perlindungan terhadap anak				perlindungan terhadap anak				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	26.780.720		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	26.780.720

	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase anak korban kekerasan anak yang dilayani	100%	288.767.200	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase anak korban kekerasan anak yang dilayani	100%	288.767.200	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	28.460.040	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	28.460.040	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	248.110.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	248.110.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	12.197.160		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	12.197.160	

	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	100%	14.340.880	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	100%	42.340.880	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Efektifitas PUG melalui implementasi Perbub PUG	-	-	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Efektifitas PUG melalui implementasi Perbub PUG	-	28.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	28.000.000	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	cakupan lembaga P2TP2A yang aktif	100%	14.340.880	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	cakupan lembaga P2TP2A yang aktif	100%	14.340.880	

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	60	14.340.880		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	60	14.340.880	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Cakupan pelaku IR yang dibina	100%	57.210.512	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Cakupan pelaku IR yang dibina	100%	57.210.512		
		DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Cakupan pelaku IR yang mandiri	56,70 %			DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Cakupan pelaku IR yang mandiri	56,70 %			

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase industri rumahan (IR) yang aktif	63%	57.210.512	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Persentase industri rumahan (IR) yang aktif	63%	57.210.512	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	49.999.802	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	49.999.802	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi	2	7.210.710	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi	2	7.210.710	

			Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Tersedia				Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Tersedia				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Data Gender dan Anak	1	30.000 .000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Data Gender dan Anak	1	30.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Data Gender dan Anak	2	30.000 .000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Data Gender dan Anak	2	30.000.000	

	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	30.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	30.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Capaian Kabupaten Layak Anak	KLA	109.176.739	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Capaian Kabupaten Layak Anak	KLA	109.176.739	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	100%	62.048.640	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	100%	62.048.640	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	26	62.048.640	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	26	62.048.640	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	45	47.128.099	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	45	47.128.099	

	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 DOKUMEN	47.128.099	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 DOKUMEN	47.128.099	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Total Fertility Rate (TFR)	2.65 %	105.916.560	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Total Fertility Rate (TFR)	2.65%	377.116.560	

	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Profil Kependudukan	1	33.275.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Profil Kependudukan	1	33.275.000	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	33.275.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	33.275.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	1	72.641.560	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	1	343.841.560	

	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1	72.641.560	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1	72.641.560	
	Pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Dokumen Laporan SIGA	-	-	Pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Dokumen Laporan SIGA	12	72.000.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	139	135.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	64.200.000	

		TENGA H					TENGA H				
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase PUS akseptor KB	62,50 %	6.438. 503.41 4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase PUS akseptor KB	62,50 %	7.494.285. 414	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah PUS yang terpapar program KKBPK	2241 85	1.425. 031.23 5	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah PUS yang terpapar program KKBPK	2241 85	1.674.813. 235	

	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	8	48.865.000	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	8	48.865.000	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	177.786.031	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	177.786.031	

	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	8	36.704.700	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	8	36.704.700	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	36	156000000	

	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26	1.161.675.504	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26	1.161.675.504	
	Pengendalian Program KKBPK	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-	Pengendalian Program KKBPK	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8	93782000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase PLKB, PPKB dan Sub PPKBD yang dibina	94,39 %	718.217.936	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase PLKB, PPKB dan Sub PPKBD yang dibina	94,39 %	780.217.936	

	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4	27.295.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4	27.295.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2054	690.922.936	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2054	690.922.936	

	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10	62000000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,74 %	3.495.759.811	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,74 %	3.495.759.811	

	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	173	586.88 4.023	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	173	586.884.02 3	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2270	641.91 8.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2270	641.918.00 0	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	50	2.047.9 57.788	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	50	2.047.957. 788	

	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	154.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	154.000.000	
	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Dukungan Operasional	15	65.000.000	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Dukungan Operasional	15	65.000.000	

	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Peresentase Kampung KB yang aktif	100%	799.494.432	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Peresentase Kampung KB yang aktif	100%	1.543.494.432	
	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	799.494.432	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	799.494.432	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L</i>	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan	-	-	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L</i>	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan	1	744000000	

		OMBO K TENGA H	Lintas Sektor di Kampung KB				OMBO K TENGA H	Lintas Sektor di Kampung KB			
	PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	66,65 %	1.293. 950.00 0	PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	66,65 %	1.293.950. 000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	66,65 %	1.293. 950.00 0	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	66,65 %	1.293.950. 000	
		DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi tentang PUP	32%			DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi tentang PUP	32%		

	Pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	10	65.000.000	Pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	10	65.000.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	25	384.750.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	25	384.750.000	

	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	133.10 0.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4	133.100.00 0	

	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	98	601.10 0.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	98	601.100.00 0	
		<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Catin /PUS yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting				<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Catin /PUS yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting			
		<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah IBU Hamil yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting				<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah IBU Hamil yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting			

		<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Jumlah Ibu pasca salin yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting				<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Jumlah Ibu pasca salin yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	154	110.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	154	110.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Nilai SAKIP OPD	B	8.805.027.702	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGAH</i>	Nilai SAKIP OPD	B	8.805.027.702	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	30.499.836	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	30.499.836	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	11.904.697	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	11.904.697	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	18.595.139	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	18.595.139	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8.136. 691.98 6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8.136.691. 986	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 /12	8.094.9 65.747	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 /12	8.094.965. 747	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	18	41.726. 239	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	18	41.726.239	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah	100 %	103.138.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah	100 %	103.138.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	37.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	37.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	21.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	21.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	44.638.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	44.638.000	

		TENGA H					TENGA H				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase validasi data aset DP3AP2KB	100	50.000 .000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase validasi data aset DP3AP2KB	100	50.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Efektifitas layanan organisasi perangkat daerah	100%	128.424.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Efektifitas layanan organisasi perangkat daerah	100%	128.424.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	46.824.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	46.824.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	81.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	81.600.000	

		TENGA H					TENGA H				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	80%	356.27 3.880	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	80%	356.273.88 0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127	342.73 0.955	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127	342.730.95 5	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	13.542.925	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>DINAS P3AP2 KB KAB.L OMBO K TENGA H</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	13.542.925	
--	--	--	--	---	------------	--	--	--	---	------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024

Perangkat daerah melakukan proses penelaahan usulan program dan kegiatan melalui modul e-musrenbang yang menjadi bagian dari sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah (*ePlanning*). Untuk tahun 2024 DP3AP2KB belum menerima usulan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya melalui aplikasi tersebut.

Table 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO,
3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya.
4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
 - Angka kematian ibu dan bayi
 - Penurunan penggunaan kontrasepsi modern
 - Rendahnya pemahaman remaja tentang keehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
 - Kebutuhan ber kb PUS yang belum terlayani (unmet need) masih tinggi
 - Prevalensi stunting masih tinggi
 - Pernikahan usia anak
 - Pemahaman fungsi keluarga yang rendah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah adalah ***Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)***. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) adalah :

- **Beriman** merupakan gambaran utuh jiwa *Akhlaqul Karimah* masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- **Sejahtera** menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- **Bermutu** merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;

- **Maju** memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- **Berbudaya** dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (*The Heart of Lombok*).

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeselamatan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah mendukung pencapaian Misi ke 2 **“Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul”**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan sasaran Terlaksananya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Yang Optimal Serta Terwujudnya Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Implementasi Kabupaten Layak Anak.
2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Kualitas Keluarga Melalui Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dengan sasaran Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).

Adapun table tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Table 3.1
Tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUN	
			TUJUAN/SASARAN		2022	2023
-1	-2	-3	-4	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Kab. Lombok Tengah)	5,84	7,1	6,8
			Rasio anak korban kekerasan yang ditangani (per jumlah anak Kab. Lombok tengah)	0,01	0,01	0,009
		Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	100	100	100

			Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap anak	100	100	100
			Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100
			Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	61,54	69,23	76,92
			Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	71,43	67,13	77,55
			Data Gender dan Anak	0	1	1
			Capaian Kabupaten Layak Anak	DIBAWAH PRATAMA	Utama	KLA
2	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk		Persentase laju pertumbuhan penduduk		1.46	1.37

		Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program KB dan pembangunan keluarga	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	59	68,27	68,32
			Rata-rata usia kawin pertama (tahun)		20	20.11
			Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	64.65	65.65	66.65
			Total Fertility Rate (TFR)	2.75	2.7	2.65
			Persentase PUS akseptor KB	60.5	61.5	62.5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan nasional, maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah, telah menyusun Program, Kegiatan Tahun 2024 dalam Tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DP3AP2KB Tahun 2024 dan prakiraan Maju tahun 2025
Kabupaten Lombok Tengah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
		Lokasi	Target	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBOK TENGAH</i>	100%	164.829.932	DAKNon Fisik-DAU		100%	181.312.925
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBOK TENGAH</i>	100%	37.356.232	DAKNon Fisik-DAU		100%	41.091.855

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2	28.974.792	DAKNon Fisik-DAU	2	31.872.271
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	26	8.381.440	DAKNon Fisik-DAU	26	9.219.584
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	127.473.700	DAKNon Fisik-DAU	100%	140.221.070
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	50	127.473.700	DAKNon Fisik-DAU	50	140.221.070

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	-	-	DAKNon Fisik-DAU	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	-	-	DAKNon Fisik-DAU	-	-
	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	-	-	DAKNon Fisik-DAU	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	315.547.920	DAKNon Fisik-DAU	100%	347.102.712
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi tentang pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	26.780.720	DAKNon Fisik-DAU	100%	29.458.792

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2	26.780.720	DAKNon Fisik-DAU	2	29.458.792
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan anak yang dilayani	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	288.767.200	DAKNon Fisik-DAU	100%	317.643.920
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	120	28.460.040	DAKNon Fisik-DAU	120	31.306.044
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100	248.110.000	DAKNon Fisik-DAU	100	272.921.000

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	12.197.160	DAKNon Fisik-DAU	1	13.416.876
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayana Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	42.340.880	DAU	100%	46.574.968
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Efektifitas PUG melalui implementasi Perbub PUG	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	-	28.000.000	DAU	-	30.800.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	-	28.000.000	DAU	-	4.600.000

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	-	-	-	-	-
					DAU		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan lembaga P2TP2A yang aktif	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	14.340.880	DAU	100%	15.774.968
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	60	14.340.880	DAU	60	15.774.968
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pelaku IR yang dibina	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	57.210.512	DAU	100%	62.931.563
	Cakupan pelaku IR yang mandiri	<i>DINAS P3AP2KB</i>	56,70%		DAU	56,70%	-

		<i>KAB.LOMBO K TENGAH</i>						
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase industri rumahan (IR) yang aktif	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	63%	57.210.512	DAU		63%	62.931.563
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2	49.999.802	DAU		2	54.999.782
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2	7.210.710	DAU		2	7.931.781
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Gender dan Anak	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	30.000.000	DAU		1	33.000.000

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data Gender dan Anak	DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH	2	30.000.000	DAU	2	33.000.000
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH	1	30.000.000	DAU	1	33.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH	KLA	109.176.739	DAU	KLA	120.094.413
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH	100%	62.048.640	DAU	100%	68.253.504

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	26	62.048.640			26	68.253.504
					DAU			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mengikuti forum anak	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	45	47.128.099			45	51.840.909
					DAU			
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2 DOKUME N	47.128.099			2 DOKUME N	51.840.909
					DAU			
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>		9.165.351.974				##### #

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2.65%	377.116.560	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B		2.65%	414.828.216
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Profil Kependudukan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	33.275.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B		1	36.602.500
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	33.275.000	DAU-DAK FISIK - DAK BOKB		1	36.602.500
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	343.841.560	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B		1	378.225.716

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	72.641.560	DAU- DAKFISIK - DAKBOK B	1	<i>79.905.716</i>
Pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Dokumen Laporan SIGA	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	12	72.000.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	12	<i>79.200.000</i>
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	139	135.000.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	139	<i>148.500.000</i>

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	12	64.200.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	12	70.620.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS akseptor KB	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	62,50%	7.494.285.414	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	62,50%	8.243.713.955
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang terpapar program KKBPK	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	224185	1.674.813.235	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	224185	1.842.294.559

Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	8	48.865.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	8	<i>53.751.500</i>
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	12	177.786.031	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	12	<i>195.564.634</i>
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	8	36.704.700	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	8	<i>40.375.170</i>
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	36	156000000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	36	<i>171.600.000</i>

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	26	1.161.675.504	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	26	<i>1.277.843.054</i>
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	8	93782000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	8	<i>103.160.200</i>
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PLKB, PPKB dan SUB PPKBD yang dibina	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	94,39%	780.217.936	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	94,39%	<i>858.239.730</i>
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	4	27.295.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	4	<i>30.024.500</i>

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2054	690.922.936	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	2054	760.015.230
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	10	62000000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	10	68.200.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	14,74%	3.495.759.811	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	14,74%	3.845.335.792

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	173	586.884.023	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	173	645.572.425
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2270	641.918.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	2270	706.109.800
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	50	2.047.957.788	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	50	2.252.753.567
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	12	154.000.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	12	169.400.000

Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	15	65.000.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	15	71.500.000
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Peresentase Kampung KB yang aktif	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	1.543.494.432	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	100%	1.697.843.875
Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	12	799.494.432	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	12	879.443.875
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	744000000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	1	818.400.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	66,65%	1.293.950.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B		66,65%	<i>1.423.345.000</i>
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	66,65%	1.293.950.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B		66,65%	<i>1.423.345.000</i>
	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi tentang PUP	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	32%		DAU- DAK FISIK - DAKBOK B		32%	-

Pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	10	65.000.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	10	<i>71.500.000</i>
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	25	384.750.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	25	<i>423.225.000</i>
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	4	133.100.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	4	<i>146.410.000</i>

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	98	601.100.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	98	661.210.000
	Jumlah Catin /PUS yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>			DAU- DAK FISIK - DAKBOK B		-
	Jumlah IBU Hamil yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>			DAU- DAK FISIK - DAKBOK B		-
	Jumlah Ibu pasca salin yang mendapat pendampingan dan pembinaan penurunan stunting	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>			DAU- DAK FISIK - DAKBOK B		-

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	154	110.000.000	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	154	<i>121.000.000</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	B	8.805.027.702	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	B	<i>9.685.530.472</i>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	30.499.836	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	100%	<i>33.549.820</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	11.904.697	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	1	<i>13.095.167</i>

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	2	18.595.139	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	2	20.454.653
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	8.136.691.986	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	100%	8.950.361.185
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	40 /12	8.094.965.747	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	40 /12	8.904.462.322
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	18	41.726.239	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	18	45.898.863

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100 %	103.138.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	100 %	113.451.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	5	37.500.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	5	41.250.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	12	21.000.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	12	23.100.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	6	44.638.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	6	49.101.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase validasi data aset DP3AP2KB	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100	50.000.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	100	55.000.000

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	0	-	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	0	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	0	-	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	0	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	50.000.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	1	55.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Efektifitas layanan organisasi perangkat daerah	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	100%	128.424.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	100%	141.266.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	12	46.824.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	12	51.506.400
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	12	81.600.000	DAU-DAK FISIK - DAKBOK B	12	89.760.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	80%	356.273.880	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	80%	391.901.268
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	127	342.730.955	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	127	377.004.051
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<i>DINAS P3AP2KB KAB.LOMBO K TENGAH</i>	1	13.542.925	DAU- DAK FISIK - DAKBOK B	1	14.897.218

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini, memuat sasaran program dan kegiatan yang akan dicapai selama tahun anggaran 2024 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi seluruh Bidang / Seksi / Sub Bagian lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana kerja ini harus dijalankan secara bertanggung jawab, dilandasi komitmen dan dedikasi tinggi agar seluruh target yang ditetapkan dapat dicapai sehingga pada akhirnya dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lombok Tengah serta mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Praya, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Tengah

BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP. 19640804 198609 2 00